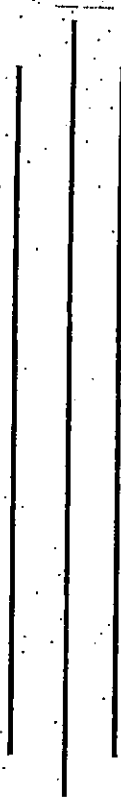




**REKOMENDASI
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2013-2017**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



REKOMENDASI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2013-2017

Dibacakan oleh : Meity Magdalena Ussu, SE, M.BA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

- Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi
DKI Jakarta;
Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi
DKI Jakarta;
Sdr. Para Anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
atau yang mewakili;
Sdr. Para Pimpinan Parpol Provinsi DKI Jakarta;

**Rekan-rekan Anggota Dewan, serta segenap Jajaran
Pejabat Eksekutif, rekan-rekan Pers dan Hadirin yang kami
hormati.**

Puji Syukur kami panjatkan atas berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.

Semoga kehadiran kita ditempat ini menjadi amal kebaikan disisi Allah Subhanahu Wata'ala, Amin Ya Rabbal Allamin... Selanjutnya sebelum kami menyampaikan rekomendasi pada kesempatan ini kami sampaikan selamat Tahun Baru 1439 Hijriah, semoga tahun ini lebih baik dari pada tahun yang lalu, Amin.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa akhir jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan berakhir pada medio Oktober Tahun 2017. Untuk itu kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan atas nama seluruh rakyat Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2012-2017 yaitu Bapak Joko Widodo, Bapak Basuki Tjahaya Purnama, dan Bapak Djarot Saiful Hidayat, yang telah bekerja secara maksimal mencurahkan pikiran dan tenaga sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta, semoga menjadi amal kebaikan Amin.

Yth. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagai implementasi Pasal 17 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, maka Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengirim surat kepada Yth. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 1844/-073.61, tanggal 23 Agustus 2017, Perihal : Penyampaian LKPJ-AMJ Tahun 2013-2017, dan telah disampaikan pidatonya dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 13 September 2017.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014, maka DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melaksanakan berbagai kegiatan rapat yang hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Sedangkan misinya adalah :

- Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain.
- Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak, serta terjangkau bagi warga kota
- Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota
- Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Yth. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Untuk melaksanakan perda dan misi tersebut diatas, Tahun 2013-2017 kepemimpinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami tiga kali pergantian yaitu Bapak Joko Widodo, Bapak Basuki Tjahaya Purnama, dan Bapak Djarot Saiful Hidayat. Ketiga Pimpinan tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, hingga hasilnya dapat kita rasakan bersama oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada ketiga Pimpinan Provinsi DKI Jakarta selama masa jabatan 2013-2017, dan apa yang telah dilakukan untuk masyarakat Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan RPJMD 2013-2017 tersebut diatas. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai lembaga survey yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat Provinsi DKI Jakarta cukup tinggi.

Yth. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Berikut ini akan saya bacakan sebagian kinerja Yth Gubernur Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2013-2017 yang terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta Bidang Kesejahteraan Rakyat:

I. Bidang Pemerintahan

1. Bahwa SKPD/UKPD dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan terdiri dari 22 SKPD, 63 UKPD, 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan yang melaksanakan 6 urusan dan 67 Program terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 7 program
 - b. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 6 program
 - c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri terdiri dari 4 program
 - d. Urusan Statistik terdiri dari 1 program dan urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 program
 - e. Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian.
2. Berbagai upaya telah dilakukan dalam Bidang Pemerintahan oleh Pihak Eksekutif sehingga DPRD Merekomendasikan sebagai berikut :
 - a. Masing-masing SKPD untuk meningkatkan kinerja kerjanya khususnya yang berkaitan dengan semua program yang telah direncanakan dan disepakati oleh DPRD. Hal ini mengingat penyerapan anggaran yang maksimal dan optimal diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian target pembangunan. Ketidak sesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan dengan realisasi, menunjukan masih rendahnya SDM SKPD dalam membuat perencanaan yang lebih adaptasional,

sistematis, terukur dan tepat manfaat. Hal ini berdampak kepada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program kegiatan belum terintegrasi antar SKPD, duplikasi program dan kegiatan, hingga bertentangan antar program kegiatan antar SKPD. Ketidakjelasan sasaran dan target yang ingin dicapai aspek komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan perencanaan pembangunan DKI Jakarta. Oleh karena itu DPRD merekomendasikan diperlukan, supervisi, monitoring dan evaluasi perencanaan dan implementasinya.

- b. Kepada masing-masing SKPD melalui BAPPEDA untuk dapat mensinkronkan seluruh program dan kegiatan agar dapat terintegrasi, sehingga program dan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai rencana dan menghapus ego sektoral di masing-masing SKPD.
3. Dengan keluarnya Peraturan Gubernur No 160 tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015, berakibat terjadinya keterlambatan proses administrasi keuangan daerah di seluruh SKPD, sehingga mengakibatkan rendahnya prosentasi penyerapan yang hanya mencapai 10% dan maksimal 80 %, kebijakan ini dilakukan akibat tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif.
 4. Hingga saat ini masih terdapat 14 kantor kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang belum memenuhi standar, sehingga mengganggu pelayanan prima.
 5. Berkaitan dengan pemberian Tunjangan Kerja Daerah PNS, seharusnya sebanding dengan penyerapan anggaran. Namun terdapat beberapa SKPD yang penyerapannya rendah dibawah 50% tetapi TKD nya tinggi, sehingga kedepan perlu ada solusi, untuk menyusun skema baru TKD yang terdapat di SKPD/UKPD yang rendah serapannya.

II. Bidang Perekonomian dan Keuangan

Bidang Perekonomian dan Keuangan terdiri dari dua urusan yaitu Urusan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai data yang disampaikan oleh Yth. Gubernur bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013 masih mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2016 tercatat penduduk miskin di DKI Jakarta sebanyak 385.840 orang atau 3,75 % dari total penduduk jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta.
2. Pegembangan pasar di DKI Jakarta yang masih melakukan revitalisasi bangunan pasar jaya tanpa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dari program atau aplikasi yang berbasis teknologi mengingat kecenderungan masyarakat Jakarta yang lebih menggunakan teknologi informasi untuk membeli sesuatu tanpa perlu pergi ke pasar atau toko modern.
3. Pemberian PMD yang diberikan kepada BUMD dalam pemanfaatannya masih dirasakan kurang tepat sasaran.
4. BUMD KBN sebaiknya dilepas karena sahamnya 26.8% dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta buat BUMD sendiri untuk pelabuhan atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemilik saham mayoritas.
5. UMKM di tata lebih baik dan menjadi perhatian khusus, UMKM harus di lihat sebagai potensi ekonomi yang besar.
6. Manajemen PTSP harus diperbaiki, pengelolaan SDM harus segera di evaluasi dan regulasi yang berbenaturan dalam tata kelola PTSP perlu di Revisi.
7. Dalam RPJMD target pendapatan 120 Triliun, namun sampai dengan akhir masa jabatan pendapatan hanya 59 Triliyun.
8. Sampai dengan saat ini wisata Jakarta belum tumbuh optimal dan yang menjadi catatan khusus adalah pulau

seribu dan menjadi destinasi kelas Internasional kebanggaan Jakarta.

9. Keberadaan BUMD bisa menjadi alternative dan solusi untuk merekrut tenaga kerja putra putri daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Berkaitan dengan peningkatan pajak tersebut diatas agar Eksekutif berkoordinasi dengan PERTAMINA, BPKP, HISWANA MIGAS dan instansi terkait lainnya. Mendapatkan data quota BBM dari perusahaan penyalur BBM, bekerja sama dengan Kementerian ESDM. Pencatatan transaksi penjualan BBM melalui "on-line system".

Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk optimalisasi PKB dan BBN-KB menurut DPRD, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan operasi gabungan bersama POLRI (canvassing) secara rutin dalam menjaring dan mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap PKB dan bekerja sama dengan dealer dan showroom KBm untuk mendorong ganti nama kepemilikan KBm.
2. Melakukan operasi door to door bagi pemilik mobil mewah yang tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan peliputan oleh media massa dan memberikan sanksi penyegelan dan penyitaan bila masih membandel.
3. Chek dan recheck data berbasis NPWP, NIK, KK terhadap kepemilikan KBm dengan instansi vertikal (DJP, Ditjen. Adminduk).

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD, dalam rangka optimalisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan diantaranya sebagai berikut :

1. Melanjutkan optimalisasi online system ketiga jenis pajak ini
2. Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan KPK-RI, tax clearance program, dan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) (penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang).
3. Melakukan analisa setoran masa dan setoran masa minimal terhadap perbaikan setoran.
4. Pemutakhiran dan pendataan WP, dan pemeriksaan terhadap WP
5. Pengukuhan obyek pajak hiburan terhadap WP Hotel dan WP Restoran yang menjalankan aktifitas hiburan sebagai core businessnya.
6. Operasi penertiban bagi usaha hiburan yang tidak/melanggar perijinan bersama Satpol PP, dan Dinas Pariwisata.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Permasalahan yang dominan pada PBB P-2 adalah pemberlakuan Pergub No. 259 tahun 2015 yaitu pembebasan PBB P-2 untuk NJOP sampai dengan nilai Rp 1 milyar, sedangkan permasalahan yang dominan untuk BPHTB adalah pemberlakuan Pergub No. 193/2016 berupa pembebasan BPHTB terhadap transaksi dengan NJOP sampai dengan Rp 2 milyar.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah ini, sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan, pemutakhiran, dan cleansing data base objek dan subjek pajak untuk PBB-P2.
2. Profiling/reprofiling data objek pajak dan subjek bagi piutang PBB-P2 yang macet
3. Pemberian stiker dan plang bagi WP besar dan korporasi yang belum membayar PBB-P2

4. Pro aktif jemput bola dalam melakukan penagihan PBB-P2 di kelurahan-kelurahan, pelayanan malam hari, pembukaan gerai pajak di mall-mall sehingga diharapkan dapat meningkatkan collection ratio-nya.
5. Melakukan koordinasi dengan BPN dan PPAT untuk mengetahui jumlah pendaftaran/mutasi sertifikat tanah.
6. Perubahan dasar pengenaan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPBJ) sebagai obyek BPHTB melalui perubahan Perda BPTHB.

Pajak Parkir

Dengan belum berkembangnya budaya masyarakat untuk menggunakan sistim transportasi publik maka permintaan akan ruang parkir khususnya ditepi jalan (on-street) harus dikendalikan dan bahkan disubstitusi menjadi parkir off-street.

Dengan sistim self assessment pada pajak ini, maka upaya-upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap WP parkir melalui compliance audit dan kalibrasi sistim aplikasi WP untuk mengetahui ketaatan WP.
2. Melanjutkan optimalisasi online system untuk jenis pajak ini.
3. Penertiban parkir liar dan yang tidak berijin.
4. Mengevaluasi tarif pajak parkir yang dikenakan bagi penyelenggara parkir off-street.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pajak daerah yang bersifat given dari Pemerintah Pusat sehingga kerjasama pertukaran data dengan instansi vertikal menjadi suatu keniscayaan.

Sedangkan pada pajak penerangan jalan, upaya-upaya optimalisasi yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Menyesuaikan tarif PPJ agar sama dengan wilayah sekitar (Bodetabek) dari semula 2,4% menjadi maksimum 6% (secara progresif).
2. Melakukan pemeriksaan data publish PLN bersama dengan instansi vertikal seperti BPKP, PLN, dan KPK-RI.

Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT)

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pajak reklame dan pajak air tanah, sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap SKPD PAT nihil dan de-watering.
2. Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan instansi terkait untuk PAT.
3. Penyisiran dan pendataan pajak reklame atas penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) dan penertiban reklame.
4. Sosialisasi kepada penyelenggara reklame untuk beralih menggunakan LED.
5. Penyesuaian nilai sewa reklame (NSR).
6. Penyesuaian klasifikasi kelas jalan dan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame.
7. Usulan penertiban reklame BDU yang masih terpasang/tayang.

Indikator Pembangunan Manusia (IPM)

Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun awal RPJMD (tahun 2013) tercatat sebesar 78,08 dan meningkat hingga mencapai 79,60 pada tahun 2016, lebih tinggi dari rata-rata tingkat nasional sebesar 69,24. Hal ini mengindikasikan besarnya kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan.

Indikator Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir pencapaian indikator ekonomi sebagai berikut :

1. Perekonomian Jakarta tumbuh antara 5,85% sampai dengan 6,11%, berada diatas pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berkisar antara 4,79% sampai 5,78% per tahun.
2. Peningkatan PDRB per kapita yang rata-rata tumbuh sebesar 10,29%, dari sebelumnya sebesar Rp155,17 juta rupiah per kapita pada tahun 2013, meningkat hingga mencapai Rp207,99 juta rupiah per kapita pada tahun 2016.
3. Dilihat dari pemerataan pendapatan (gini ratio), terjadi penurunan ketimpangan pendapatan dari 0,43 pada tahun 2014 menjadi 0,39 pada tahun 2016.
4. Tingkat inflasi, dalam dua tahun terakhir dapat dikendalikan pada tingkat 3,30% pada tahun 2015 dan menjadi 2,37% pada tahun 2016.
5. Kinerja perekonomian Jakarta dapat juga dilihat dari satbilnya nilai ekspor-impor barang dan jasa selama lima tahun terakhir. Nilai ekspor produk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar 11.375,24 juta US\$ meningkat menjadi sebesar 11.546,19 juta US\$ pada tahun 2014. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi global yang juga berdampak terhadap perekonomian Jakarta namun nilai ekspor produk Provinsi DKI Jakarta kembali bertumbuh menjadi sebesar 11.033,05 juta US\$ pada tahun 2016.
6. Dari sisi kesempatan kerja juga terjadi kinerja yang menggembirakan, yaitu terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9,87% pada tahun 2012 menjadi 6,12% pada tahun 2016.
7. Selain itu juga tampak dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta, jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 2,31 juta orang pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,51 juta orang pada tahun 2016.

Indikator Sosial

Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 tercatat sebesar 385.840 orang atau 3,75% dari total penduduk Provinsi DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin ini mengalami kenaikan sedikit bila dibandingkan pada tahun 2013 yang disebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global tahun 2014 yang melanda seluruh negara-negara di dunia yang juga berimbas terhadap perekonomian Jakarta. Dan telah dilakukan berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan, antara lain mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Bantuan Iuran BPJS, penciptaan lapangan kerja padat karya melalui rekrutmen PPSU, dan program-program lainnya.

Pencapaian ketiga indikator tersebut menunjukkan keberhasilan dalam mengelola pembangunan dan bahwa pembangunan yang dijalankan telah berada dijalur yang tepat. Dimana berbagai upaya pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur kota yang telah kita kerjakan bersama berhasil meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi DPRD terhadap belanja daerah dan penyerapan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sasaran dan prioritas belanja sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perda RPJMD.
2. Mengakomodir seluruh program yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam musrenbang.
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
4. Menyediakan alokasi anggaran yang cukup dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
5. Lebih memprioritaskan sektor UMKM sebagai penyedia barang dan jasa dengan tetap mempertahankan kualitas pekerjaan.

6. Terkait dengan penyerapan belanja daerah, perbaikan tata kelola lelang sehingga menimbulkan kepastian bagi pihak ketiga yang telah memenangkan lelang.
7. Mengurangi kesalahan-kesalahan administrasi penganggaran seperti salah nomenklatur, salah kode rekening, salah tupoksi SKPD/UKPD dan lain-lain.

III. Bidang Pembangunan

1. Perencanaan Pembangunan

Agar penggunaan APBD dapat lebih efektif, DPRD mendukung pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dengan sistem e-katalog.

Melalui upaya ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin mampu menjaga akuntabilitas dalam proses perencanaan.

DPRD mengharapkan kedepan agar tidak terjadi miss communication antara BPBJ dengan instansi terkait dalam pencantuman nomenklatur yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran perlu dilakukan koordinasi sebelum dilakukan proses pelelangan.

2. Pengendalian Banjir, Rob dan Genangan Air

DPRD dapat memahami bahwa pengendalian banjir, rob dan genangan air dalam kurun waktu 5 Tahun, sudah ada peningkatan yang berarti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berusaha menangani banjir dengan berbagai upaya, khususnya Pembangunan Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, pembangunan tanggul A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) pada Aliran Tengah dengan pemancangan sheetpile sepanjang 3.683 m di Luar Batang dan Kamal Muara, di Aliran Barat dengan Pemancangan Spun Pile sepanjang 61 M di Muara Baru serta Aliran Timur dengan pemancangan Spun Pile sepanjang 250 M di Kali Blencong, penataan Waduk Ria Rio dan Waduk Pluit

untuk peningkatan kapasitas badan air, Pembangunan Sistem Polder dan Long Storage serta dilakukan pengerukan di seluruh drainase kota.

Selain itu juga telah dilaksanakan pembebasan tanah untuk Kali/Saluran seluas 452.937 M².

DPRD mengharapkan perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya masalah pembebasan tanah untuk waduk, situ, embung dan kali yang menjadi kewenangan Pemerintah DKI Jakarta. Perlu dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan pemerintah pusat sebagai pelaksana pembangunan fisik, agar program tersebut segera dapat terealisasi. Terkait pengendalian perlu dilakukan kerjasama dengan daerah penyangga yang berbatasan dengan Jakarta (Jabodetabekjur) khususnya dengan daerah Jawa Barat dan Banten agar pengendalian banjir di Ibukota dapat lebih berhasil diatasi.

3. Peningkatan Jalan dan Jembatan

Ketidakseimbangan antara peningkatan jalan dengan peningkatan jumlah pengguna jalan (kendaraan/orang), merupakan kondisi yang menimbulkan masalah kemacetan di Ibukota Jakarta. Meskipun belum berhasil secara signifikan mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya secara maksimal untuk meminimalisir kemacetan yang ada di Ibukota Jakarta, yaitu dalam kurun lima tahun telah menyelesaikan pembangunan 3 Fly Over (Fly Over Pulogebang, Fly Over Kuningan Sisi Selatan dan STS Permata Hijau), peningkatan 11 ruas jembatan dan penyelesaian pembangunan Simpang Susun Semanggi dan Jalan Layang Non Tol Ciledug – Blok M – Tendeau, serta Penyelesaian Peningkatan Jalan-jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta seluas 756.786 M², Penyelesaian Penataan Jalur Pendestrian/Trotoar seluas 160.684 M² dengan panjang 49.752 M.

DPRD mengharapkan agar pembangunan Fly Over dan Underpass dan jalan layang non tol serta pembangunan

MRT tetap terus dilanjutkan. Perlu dilakukan perbaikan peningkatan kapasitas jalan lokal, alteri dan kolektor serta pemeliharaan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak dan berlubang.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota Dinas Kehutanan :

Sebagai tindaklanjut dalam Amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mensyaratkan Jakarta sebagai Ibukota yang harus mampu mencapai target pada pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan harus tercapai sebesar 30 % dari luas wilayah DKI Jakarta, namun hingga saat ini pencapaian RTH di Jakarta kurang lebih baru mendekati 10 %.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan RTH adalah penambahan perluasan lahan yang mengalami kendala baik secara administrasi maupun fisik dilapangan. Oleh karena itu DPRD mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan solusi terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembebasan/pengadaan lahan RTH, seperti melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan sehingga kedepan jangan sampai terulang kembali dengan alasan status tanah yang belum jelas dan lain lain.

Pengelolaan sampah di Ibukota Jakarta sudah selayaknya menjadikan contoh bagi kota-kota lain di negara kita. Warga DKI Jakarta seharusnya sudah mampu mengolah sampah rumah tangga, memilah sampah organik, un organik, sampah basah, sampah kering dan seterusnya, agar pengelolaan selanjutnya lebih mudah dan teratur.

DPRD memberikan apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan dan memperluas sentra 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) di 5 Wilayah Kota, agar kedepan dapat di kembangkan dan diperluas jangkauannya.

Dalam rangka mengantisipasi penanggulangan sampah yang semakin besar di masa mendatang, perlu pemikiran untuk mengurangi kapasitas TPST. Bantar Gebang yang sampai saat ini sudah mencapai 6500 ton/hari, untuk itu perlu banyak pembangunan Intermediated Treatment Facility (ITF) di DKI Jakarta dengan teknologi canggih dan ramah lingkungan yang mana dengan sistem pengelolaan sampah ITF ini akan mampu menambah kapasitas pengolahan sampah sebanyak 3000 ton/hari. melalui upaya tersebut maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap akan mengurangi ketergantungan kepada TPST. Bantar Gebang.

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dari Tahun 2013 – 2017 rumah susun sudah terbangun sebanyak 5.177 unit hunian dari target 2.443 unit hunian (telah melampaui target. Dalam rangka mendukung kebijakan permukiman dan interaksi warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebanyak 123 lokasi dan CSR sebanyak 57 lokasi. Dan ada 100 lokasi pembangunan RPTRA sedang dalam proses penyelesaian dalam Tahun 2017.

Untuk menjadi catatan terkait pembangunan Rumah Susun perlu ada pengawasan yang ketat agar dalam pembangunan Rumah Susun hasilnya lebih manusiawi jangan asal-asalan terbangun, hal ini kami sampaikan karena dari hasil peninjauan ke lokasi pembangunan Rumah Susun masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dan perlu dilakukan perbaikan seperti tembok/dinding yang tidak rata, pengecatan yang asal-asalan, banyak bangunan yang retak, dan lain-lain.

DPRD berharap kepada Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman harus lebih selektif lagi dalam mencari fendor sebelum melakukan proses pembangunan dan mengharapkan jangan hanya memikirkan pencapaian

target tapi harus juga diberangi dengan penyerapan anggaran sehingga tidak terjadi silpa setiap tahunnya.

6. Penataan Ruang

Sebagai tindaklanjut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ. Dengan terbitnya UU dan Perda tersebut merupakan tonggak penegakan dan penataan ruang yang semakin baik di masa yang akan datang. Perlu komitmen yang kuat dari Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD dan seluruh masyarakat Jakarta agar perda tersebut dapat berjalan dengan baik. Diharapkan melalui perda RTRW urusan penataan ruang semakin baik permasalahan ketatakotaan, kesemerawutan, kemacetan dan banjir dan lainnya dapat di atasi.

Terkait pengawasan dan penertiban bangunan pada saat ini bisa dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan karena perizinan sekarang ada di DPM & PTSP. DPRD mengharapkan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melakukan koordinasi dengan dinas terkait apabila ingin melakukan penertiban bangunan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penertiban.

Kesimpulan

1. DPRD mengharapkan kepada seluruh SKPD dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup agar lebih matang/baik dalam membuat perencanaan kegiatan sehingga tidak terjadi lagi kegiatan yang tidak terserap yang membuat silpa
2. DPRD mengharapkan kedepan tidak ada lagi kegiatan yang tidak terserap di karenakan gagal lelang dan juga pembebasan lahan oleh karena itu kedepan Dinas harus melakukan koordinasi dengan BPN terkait gagalnya proses pembebasan lahan dikarenakan status tanah atau kepemilikan lahan,

3. DPRD mengharapkan kedepan dapat mengkaji ulang lelang konsolidasi diseluruh SKPD
4. DPRD mengharapkan kepada Pemerintah Khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membuat kebijakan khusus untuk mengatasi masalah tunggakan Rumah Susun yang saat ini sedang terjadi dan apabila di di amkan akan menjadi masalah di kemudian hari
5. DPRD mengharapkan ke pada Dinas Kehutanan tidak terulang kembali dalam perencanaan pembebasan lahan yang tidak terserap seperti pada tahun 2016 yaitu gagalnya pembebasan lahan EX Kedutaan Inggris sehingga menjadi silpa dan banyaknya proses gagal lelang (lelang konsolidasi) pada tahun yang sama

IV. Bidang Kesejahteraan

Bidang Kesejahteraan terdiri dari lima urusan yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Sosial, Urusan Pemuda dan Olah Raga, Urusan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

A. URUSAN PENDIDIKAN

Dalam mencermati urusan pendidikan dari tahun 2013-2017 DPRD memberikan catatan dari berbagai persoalan dibidang pendidikan yang berkembang dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. DPRD mengapresiasi program KJP (kartu Jakarta Pintar) yang telah direalisasikan sejak tahun 2013 dalam rangka membantu siswa di wilayah DKI Jakarta dan terus memantau pelaksanaan program ini karena masih ditemui penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. Dalam penerbitan dan pendistribusian Kartu Jakarta Pintar (KJP diharapkan benar-benar tepat sasaran terutama kepada warga yang berhak menerimanya.

KJP ini adalah program keberhasilan dari Gubernur dan diharapkan dapat diteruskan oleh gubernur mendatang.

3. DPRD mengapresiasi Program KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa) yang di mulai sejak tahun 2016 dan diharapkan jumlah peserta didik semakin meningkat setiap tahunnya.
4. Dalam rangka menciptakan pendidikan yang berkarakter, DPRD melihat betapa pentingnya pendidikan sejak usia dini atau PAUD dengan menekankan perlunya dinas pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan di PAUD, standarisasi guru, legal aspek dalam pelaksanaan PAUD di DKI Jakarta.
5. Melihat alokasi anggaran dinas pendidikan sejak tahun 2013 –2017 \pm 26% melebihi 20% seperti yang di amanatkan dalam undang-undang, DPRD menilai adanya kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan diwilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Dalam mendukung sarana dan prasarana pendidikan, DPRD menilai kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan proses belajar mengajar dengan melakukan rehab total dan rehab berat gedung-gedung sekolah disepanjang tahun 2013-2014, tapi tetap DPRD meminta Gubernur mempertimbangkan rehab fasilitas sarana dan prasarana gedung sekolah-sekolah swasta.
7. Untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dan keluarga yang tidak mampu, DPRD meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat aturan yang berkaitan dengan pemberian beasiswa bagi siswa putus sekolah khususnya di sekolah-sekolah swasta.
8. Terkait kekurangan tenaga pendidik di Provinsi DKI Jakarta dan untuk mengatasi krisis guru ditahun 2022, DPRD menyoroti perlu adanya perbaikan dalam sistem perekrutan guru-guru PNS dan mencari solusi penyelesaian persoalan guru honor dan guru bantu.

9. Pelaksanaan sistem lelang konsolidasi terhadap rehab berat dan total pada prakteknya sering mengalami kendala, DPRD merekomendasikan untuk meninjau kembali pelaksanaan sistem lelang konsolidasi ini.
10. Ujian Nasional Berbasis Komputer, (UNBK) merupakan terobosan sistem pendidikan yang meminimalisasi kecurangan ujian, namun kedepannya sistem ini harus ditingkatkan 1 (satu) siswa menggunakan 1 (satu) komputer agar targetnya dapat terpenuhi.

B. URUSAN KESEHATAN

1. DPRD mengapresiasi program pemerintah daerah melalui pelayanan 'Ketuk Pintu layani dengan hati' dengan prinsip pelayanan kesehatan yakni melayani dengan hati sampai tuntas, orang sakit tidak boleh menjadi miskin, diharapkan prestasi dari program unggulan ini dapat terus ditingkatkan dan program dapat diteruskan di pemerintahan mendatang.
 2. DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar rumah sakit swasta di wilayah DKI Jakarta dapat seluruhnya melayani pasien BPJS tanpa terkecuali dan mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengatur hal tersebut.
 3. Apresiasi kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan membuat layanan kesehatan yang terintegrasi JSC (Jakarta Smart City), diharapkan ke depannya sistem ini dapat terintegrasi secara menyeluruh dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.
 4. Dalam peningkatan layanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, DPRD melihat kesungguhan pemerintah dalam memberi layanan prima kepada masyarakat dengan mengadakan armada ambulance disemua tingkatan mulai dari kelurahan dan jumlahnya terus meningkat dari 2013 yang hanya 18 buah menjadi 175 ditahun 2018.
-

5. Program BPJS agar sesegera mungkin diperbaiki dengan membuat aturan penanganan pasien keadaan darurat agar diterima ditangani rumah sakit, perlu perhatian semua pihak. Saran juga kepada dinas kesehatan dan BPJS dengan mereview kembali paket INA CBG'S
6. DPRD mengapresiasi kepada pemerintah karena dalam kurun waktu 5 tahun memberi pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta dengan membangun 44 puskesmas di kecamatan, 285 puskesmas kelurahan, 30 RSUD/RSKD dimana layanan sudah cukup baik.
7. Selama kurun waktu 2013-2017 pemerintah mampu meningkatkan target kepersertaan PBI, ditahun 2017 telah mencapai 3.921.538 dengan target yang tercover 3.621.638 atau 92,36%.
8. Apresiasi kepada pemerintah terhadap program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yaitu berupa penyediaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang semakin tahun terus meningkat, namun DPRD memandang perlu bahwa ada penambahan dana PBI.
9. Dalam rangka memaksimalikan pelayanan kesehatan di RSUD, DPRD menilai perlu adanya koordinasi yang baik dengan BPJS, dengan hal pembayaran klaim dari BPJS kepada pihak rumah sakit agar pelayanan dapat maksimal.

C. URUSAN SOSIAL

1. Permasalahan PMKS yang beraktifitas di jalan dan mengganggu ketertiban umum harus dilakukan penertiban secara maksimal dan terpadu
2. Perlu koordinasi antar lembaga sosial baik pemerintah atau swadaya masyarakat dalam melakukan pelayanan.

3. Adanya koordinasi antara dinas sosial dan dinas kesehatan (rumah sakit) untuk menangani pasien yang terlantar dan tinggal menginap di rumah sakit.
4. Perlu peningkatan bantuan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada PMKS dengan cara peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS di panti sosial.
5. Perlu diberdayakan kembali keluarga miskin dan PMKS potensial dengan memberi bantuan pekerjaan atau lapangan pekerjaan agar dapat menghidupi diri dan keluarganya.

D. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Untuk Olahraga dan kepemudaan, DPRD mengharapkan agar prestasi-prestasi yang diraih oleh atlet-atlet DKI dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.
 2. Persoalan KONI, dualisme kepemimpinan, agar dapat diatasi dengan baik sehingga pembina atlet-atlet dapat berjalan lancar kembali.
 3. Persoalan bonus atau janji kepada atlet-atlet yang berprestasi agar dapat terlaksana.
 4. Alokasi dana anggaran pembinaan atlet-atlet DKI agar dapat ditambahkan agar pembinaan kepada atlet-atlet dapat terus ditingkatkan.
 5. DPRD merekomendasi pengembangan pembinaan yang terintegrasi mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan agar generasi muda yang berprestasi dapat dibina untuk kemajuan dunia olahraga di DKI Jakarta.
 6. Kegiatan aspirasi masyarakat diharapkan tidak dikerjakan di akhir tahun dan perencanaannya harus dengan baik.
-

E. URUSAN PEMEBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA

1. DPRD mengapresiasi project Gubernur dalam membangun RPTRA Kalijodo menjadi tempat olahraga "sport center" yang dapat bermanfaat bagi rakyat Jakarta.
2. DPRD menilai keberhasilan Gubernur dalam membangun RPTRA diseluruh wilayah DKI Jakarta yang berkembang pesat, diharapkan kedepannya pembangunan RPTRA diwilayah kumuh dapat ditingkatkan
3. Program Keluarga berencana diwilayah DKI Jakarta sudah berjalan baik dengan meningkatnya jumlah pasangan usia subur menjadi peserta KB baru dan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.
4. Dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan, DPRD merekomendasikan agar dibangun Tempat Penitipan anak (TPA), dimulai dari gedung-gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya diwilayah yang rawan kekerasan terhadap anak.

Yth. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Adapun mengenai Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dari seluruh bidang kegiatan, secara lengkap akan disampaikan terlampir bersama dengan Surat Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Diharapkan agar Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap LKPJ-AMJ Tahun 2013-2017 dapat menjadi pendorong bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta serta Pihak Eksekutif dan pihak terkait lainnya, atas kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini.

**Billahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Jakarta, 29 September 2017
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,**



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH